

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa Indonesia tetap mempertahankan komitmen dan keterlibatan aktifnya dalam Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) meskipun menghadapi berbagai tantangan implementasi yang signifikan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan keterlibatan Indonesia dalam CTI-CFF tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan kepentingan nasional yang bersifat material, tetapi juga perlu dipahami melalui perspektif international governance yang menekankan pentingnya koordinasi, kepemilikan bersama, jaringan kerja sama, dan norma kolektif dalam mempertahankan institusi regional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi CTI-CFF, antara lain kompleksitas koordinasi kelembagaan antar kementerian dan pemerintah daerah, keterbatasan pendanaan dan ketergantungan pada dukungan donor internasional, kesenjangan implementasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta karakter CTI-CFF yang bersifat non-legally binding sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada komitmen politik masing-masing negara anggota. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi agenda CTI-CFF di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis konservasi laut, tetapi juga mencerminkan persoalan tata kelola (governance) yang melibatkan berbagai aktor dan tingkat pemerintahan.

Meskipun menghadapi tantangan tersebut, Indonesia tetap menunjukkan komitmen yang konsisten terhadap CTI-CFF. Komitmen tersebut tercermin melalui penyusunan dan

implementasi National Plan of Action (NPOA) CTI-CFF Indonesia, kesediaan menjadi tuan rumah Regional Secretariat CTI-CFF di Manado, partisipasi yang berkelanjutan dalam berbagai forum regional CTI-CFF, serta kesinambungan program konservasi dan pengelolaan sumber daya laut yang selaras dengan agenda CTI-CFF. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan Indonesia tidak bersifat simbolis, melainkan diwujudkan melalui kebijakan nasional dan tanggung jawab kelembagaan di tingkat regional.

Berdasarkan analisis menggunakan konsep international governance Thomas Risse, terdapat beberapa faktor utama yang mendorong Indonesia tetap aktif dalam CTI-CFF. Pertama, adanya regional ownership yang menempatkan Indonesia sebagai negara penggagas dan pemimpin regional sehingga menciptakan tanggung jawab kelembagaan dan diplomatik untuk menjaga keberlangsungan CTI-CFF.

Kedua, kebutuhan terhadap koordinasi regional dalam pengelolaan kawasan Coral Triangle yang memiliki karakteristik ekosistem lintas batas dan tidak dapat dikelola secara unilateral oleh Indonesia. Ketiga, keberadaan network governance yang memberikan akses terhadap dukungan pendanaan, penguatan kapasitas, bantuan teknis, dan jejaring diplomasi internasional di bidang kelautan dan lingkungan. Keempat, adanya norma tanggung jawab kolektif terhadap keberlanjutan kawasan Coral Triangle sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia yang memperkuat komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi dalam kerja sama tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan komitmen Indonesia dalam CTI-CFF merupakan hasil dari interaksi antara kepemimpinan regional, kebutuhan koordinasi lintas batas, jaringan kemitraan internasional, dan norma kolektif dalam tata kelola kawasan Coral Triangle. Temuan ini menunjukkan bahwa kerja sama regional yang bersifat non-legally

binding tetap dapat dipertahankan apabila negara anggota memiliki rasa kepemilikan bersama, kepentingan strategis terhadap keberlanjutan kawasan, serta keterikatan institusional dan normatif terhadap mekanisme tata kelola regional tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi penguatan implementasi CTI-CFF di Indonesia maupun pengembangan penelitian selanjutnya.

5.2.1 Rekomendasi Kebijakan

Pertama, pemerintah Indonesia perlu memperkuat mekanisme koordinasi lintas sektor dalam implementasi CTI-CFF melalui penguatan peran National Coordinating Committee (NCC), integrasi program antar kementerian dan lembaga, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kedua, pemerintah perlu meningkatkan keberlanjutan pendanaan implementasi CTI-CFF dengan memperkuat skema pembiayaan domestik untuk konservasi laut, pengelolaan perikanan berkelanjutan, dan rehabilitasi ekosistem pesisir sehingga ketergantungan terhadap dukungan donor internasional dapat dikurangi secara bertahap.

Ketiga, Indonesia perlu terus mempertahankan peran kepemimpinannya dalam CTI-CFF dengan mengoptimalkan fungsi Regional Secretariat di Manado sebagai pusat koordinasi regional, pertukaran pengetahuan, pengembangan kapasitas, dan diplomasi kelautan kawasan Coral Triangle. Penguatan peran tersebut penting untuk menjaga efektivitas tata kelola regional

dan memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor utama dalam pengelolaan kawasan Coral Triangle.

Keempat, pemerintah perlu memperluas pelibatan masyarakat pesisir, akademisi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam implementasi agenda CTI-CFF agar pengelolaan sumber daya kelautan dapat dilakukan secara lebih partisipatif dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip multi-stakeholder governance.

5.2.2 Saran Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada analisis komitmen dan keterlibatan Indonesia dalam CTI-CFF melalui perspektif *international governance*. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi *National Plan of Action (NPOA)* CTI-CFF di tingkat daerah, khususnya pada wilayah-wilayah yang menjadi prioritas konservasi dan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem.¹

Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat melakukan studi komparatif antara Indonesia dan negara anggota CTI-CFF lainnya untuk melihat perbedaan tingkat komitmen, kapasitas kelembagaan, dan efektivitas implementasi kerja sama regional dalam pengelolaan kawasan Coral Triangle. Kajian komparatif tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan tata kelola lingkungan regional di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik.

Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji hubungan antara CTI-CFF dengan agenda *blue economy*, perubahan iklim, dan diplomasi maritim Indonesia secara lebih luas sehingga dapat

¹ Sekretariat, “Rencana Aksi Nasional 2.0 CTI-CFF Indonesia 2025-2030.”

memberikan kontribusi yang lebih mendalam terhadap pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya dalam bidang *regional environmental governance* dan *marine governance*.

